

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat tidak akan dapat dipisahkan oleh hukum. Karena hukum akan mengatur bagaimana pola masyarakat tersebut berjalan dan tidak bersinggungan kepentingan satu sama lain.

“Hukum menurut Soerojo Wignjodipoero, S.H. adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan Sudikno Mertokusumo mengartikan hukum sebagai kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah –kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah mempunyai isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang dan normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta bagaimana cara melaksanakan kepatuhan kepada kaedah-kaedah”.¹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan suatu rangkaian peraturan yang ditujukan pada perilaku manusia untuk mengatur pola agar dapat berjalan lancar. Dan hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa unsur-unsur yang berkaitan. Sehingga hukum memiliki beberapa unsur yang saling terkait dan membentuk himpunan.

Lawrence M. Friedmen mengatakan bahwa hukum dapat berjalan efektif ketika terdapat 3 unsur sistem yang berjalan tegak, unsur tersebut adalah yang pertama substansi hukum yakni isi materi dari hukum, yang kedua yakni struktur atau penegak hukum kemudian yang ketiga adalah kultur atau

¹ Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti. 2005. Hal. 38

kesadaran masyarakat akan hukum itu sendiri. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar dapat membentuk sistem hukum yang efektif.²

Unsur penegak hukum merupakan salah satu unsur terpenting agar dapat berjalan tegak. Karena penegak hukum merupakan unsur yang dapat menjalankan norma itu sebagaimana mestinya. Oleh karena itu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya harus bebas dari intervensi manapun agar dapat menegakkan norma secara objektif. Penegak hukum harus menegakkan nilai mulai dari awal kasus penyelidikan hingga kasus tersebut diputuskan. Namun tentunya dalam proses tersebut memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Seperti halnya dalam proses penyelidikan hingga penyidikan yang mana merupakan wewenang dari Kepolisian. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu unsur pejabat Kepolisian yang memegang unsur penting dalam pengusutan kasus adalah penyidik.

Pada penelitian ini akan dibahas mengenai tanggung jawab penyidik dalam kepolisian yang juga merupakan salah satu unsur struktur hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dijelaskan bahwa Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kemudian Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti

² Zaeni Asyhadie. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya : Grafindo Persada. 2013. Hal 20.

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Berdasarkan hal tersebut terdapat satu rangkaian penting dalam kegiatan penyidikan yakni terkait dengan barang bukti, termasuk dalam mengungkap kejahatan narkoba

Kejahatan narkoba merupakan kejahatan tergolong *extraordinary crime*. hal tersebut karena kejahatan narkoba memiliki dampak yang sangat sistemik terhadap keberlangsungan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba salah satunya dengan membuat regulasi terkait yakni dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 agar menjadi pijakan para penegak hukum dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, selain itu juga telah ada regulasi Perkapolri Nomor 10 tahun 2010 terkait dengan tata cara pengelolaan barang bukti, dan dijelaskan bahwa untuk narkoba diatur didalam pasal 8 ayat 4 yang menyatakan “Dalam hal barang bukti temuan narkoba jenis tanaman, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib dimusnahkan sejak saat ini, setelah sebagian disisihkan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini mengingat bahwa penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan luar biasa, sehingga barang bukti menjadi sangat penting untuk dapat mengungkap jaringan-jaringan narkoba terkait.

Ketika proses pengungkapan kejahatan narkoba terdapat beberapa resiko yang dapat saja merintangi penyidikan salah satunya terkait dengan hilangnya barang bukti yang dikhawatirkan akan menunda penyidikan dan membuka resiko jika disalahgunakan oleh beberapa oknum yang justru

seharusnya tidak terjadi demikian. Seperti pada kasus yang terjadi di Kepulauan Riau yakni narkoba jenis sabu-sabu hilang sebanyak 16kg, dan diduga melibatkan anggota oknum polisi beserta kepala satuan dengan dugaan penggelapan barang bukti narkoba.³ Kemudian kasus lainnya terjadi melibatkan jaksa penuntut umum dari Kejari Makassar dan penyidik narkoba Polresta Makassar yakni barang bukti awal yang dimiliki terdakwa sebelumnya sebanyak 81 gram, kemudian ketika dalam proses persidangan hanya sebesar 21 gram sehingga dalam hal ini sebagian jaksa tidak mampu memperlihatkan 59.4 gram.⁴ Kemudian kasus yang terjadi di Kepolisian Sektor Klojen dimana terdapat tiga kasus kejahatan narkoba yang tidak terungkap hingga ke seluruh pihak ketiga kasus tersebut tidak terungkap hingga ke seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan narkoba jenis tanaman karena terdapat beberapa kendala pada prosedur pengelolaan barang bukti. Bahkan kendala tersebut dikarenakan ketidaksesuaian antara perundang-undangan dengan penerapan secara nyata atau tidak selaras antara *das solen* dengan *das sein*. Hal inilah yang dikhawatirkan justru akan menghambat dari proses penyelesaian kasus tersebut dan terjadi penyelewengan kekuasaan.

Atas dasar hal tersebutlah pengungkapan kejahatan narkoba membutuhkan suatu rangkaian sistematis agar tidak semakin menyebarluas ke masyarakat dan juga mencegah adanya penyelewengan barang bukti narkoba yang justru akan semakin memperburuk resiko dari narkoba itu sendiri. Dan

³ Samsudar Syam. "Barang Bukti Sabu-sabu 16 Kg Hilang, 5 Oknum Polisi Terlibat?". 2017. dalam <http://pojoksatu.id> diakses 19 April 2018.

⁴ Rudhy. *Barang Bukti Narkoba Hilang, Jaksa dan Polisi Harus Diperiksa*. 2011. dalam <http://m.tribunnews.com> diakses 30 April 2018.

pada kenyataannya di lapangan, data menunjukkan penyalahgunaan narkoba masih saja terus mengembang di Indonesia. Bahkan di Kabupaten Malang, pada bulan Maret 2018 menunjukkan data bahwa bahkan pecandu narkoba didominasi oleh kalangan pelajar. Kemudian berdasarkan catatan dari Kepolisian di Sektor Klojen pada bulan Mei tahun 2016, yakni dua hari berturut-turut menangkap kasus narkoba jenis ganja. Sehingga hal inilah yang justru membuat masyarakat semakin resah akan dampak yang ditimbulkan, dan dibutuhkan suatu penanganan kasus narkoba yang sistematis agar dapat mengungkap keseluruhan jaringan yang terlibat. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul “TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MENGAMANKAN BARANG BUKTI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN PASAL 8 AYAT 4 PERKAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BARANG BUKTI”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tanggung jawab penyidik kepolisian dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan pasal 8 ayat 4 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti?
2. Bagaimana faktor kendala dalam mengamankan barang bukti berkaitan dengan penyidikan kasus narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui tanggung jawab penyidik kepolisian dalam mengamankan barang bukti pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan pasal 8 ayat 4 Perkapolri Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti;
2. Untuk mengetahui kendala dalam mengamankan barang bukti berkaitan dengan penyidikan kasus narkoba

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat yakni sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi penulis untuk menambah pengetahuan dalam permasalahan yang akan diteliti oleh penulis dalam mengetahui penerapan pengamanan barang bukti narkoba oleh penyidik di Kepolisian Sektor Klojen dan sebagai syarat untuk penulisan tugas akhir memperoleh gelar sarjana strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi kalangan akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi kalangan akademisi dalam menambah pengetahuan terkait penerapan pengamanan barang bukti narkoba oleh penyidik di Kepolisian Sektor Klojen dalam kaitannya dengan pentingnya barang bukti untuk mengungkap kejahatan narkoba.

3. Bagi penegak hukum

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para penegak hukum lainnya yakni sebagai bahan untuk pertimbangan dalam penerapan pengamanan barang bukti narkoba oleh penyidik di Kepolisian Sektor Klojen dalam kaitannya dengan pentingnya barang bukti untuk mengungkap kejahatan narkoba.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan bagi kalangan aparat penegak hukum terutama penyidik dalam mengamankan barang bukti narkoba sehingga dapat menjadi referensi aparat penyidik di lembaga kepolisian lainnya agar dapat mengungkap rangkaian kejahatan narkoba secara sistematis dan dapat mengungkap seluruhnya dan tidak semakin menyebarluas ke masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengamanan barang bukti tindak pidana narkoba. Kemudian pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisa kasus narkoba yang terjadi di Kepolisian Sektor Klojen.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih oleh penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum adalah Polsek Klojen yang ada di Kota Malang. Adapun data awal yang telah didapatkan penulis adalah adanya beberapa kasus penyalahgunaan narkoba jenis tanaman yang tercatat di Polsek Klojen yakni sebagai berikut.

- a. Pada 15 Mei 2016, pukul 23.00 wib telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja di Jl. Simpang Ijen (Pinggir Jalan) Kel. Oro-Oro dowo Kec. Klojen Kota Malang, yang dilakukan oleh pelaku Muhamad Holili, tersangka di tangkap setelah tersangka kedapatan sedang memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I jenis ganja.
- b. Pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, pukul 02.30 wib telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, menjual, menyerahkan atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk tanaman ganja di Jl Sebuku Rt 06 Rw 08 Kel. Bunulrejo Kec. Blimbing Kota Malang, tepatnya di dalam kamar yang disimpan di dalam lemari., yang dilakukan oleh Waluyo Harianto
- c. Pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2017 telah terjadi tanpa hak melawan hukum menjual menyerahkan atau menjadi perantara dalam

jual beli narkoba golongan I jenis ganja dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan menyediakan narkoba golongan I jenis ganja sebagaimana yang dimaksud, yang dilakukan oleh Moch Andre Hermawan kepada Anggariska Seto Bakti.

Namun adanya ketiga kasus tersebut tidak terungkap hingga ke seluruh pihak yang terlibat dalam kejahatan narkoba jenis tanaman karena terdapat beberapa kendala pada barang bukti. Sehingga berdasarkan adanya penemuan kasus tersebut, penulis memilih untuk melakukan penelitian di Polsek Klojen, Kota Malang yang beralamat di Jl. Kelud No.55, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

3. Sumber Data

Dalam penulisan ini penulis menggunakan beberapa sumber data sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penulisan ini adalah hasil wawancara dengan Kepolisian di sektor Klojen yakni dengan IPTU Gunawan Mrskupi selaku Penyidik Kepolisian Sektor Klojen dan pengumpulan informasi maupun data, dokumen tertulis, rekaman, informasi, pendapat dan lain-lain dilokasi penelitian. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah data hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan yakni metode penelitian yang menggunakan pencarian data terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literature, artikel, jurnal, serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku yakni Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti, Undang- Undang Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Narkotika.

4. Teknik pengumpulan data/ informasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan Kepolisian di sektor Klojen yakni dengan IPTU Gunawan Mrskupi selaku Penyidik Kepolisian Sektor Klojen

“Wawancara adalah proses memperoleh data berupa keterangan dalam penelitian dengan cara memberikan pertanyaan dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, baik menggunakan pedoman wawancara atau tidak.⁵ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.”⁶

Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah kegiatan untuk memperoleh data yang digunakan untuk penelitian melalui memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan secara langsung bertatap muka dan dengan jumlah responden yang lebih sedikit.

5. Teknik analisa data

Penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif. Model desain penelitian kualitatif terdiri dari tiga model, yaitu format deskriptif, format

⁵ Bungi, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta. Penerbit Kencana. 2013. Hal. 133.

⁶ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung. Penerbit CV Alfabeta. 2011. Hal. 194.

verifikasi, dan format *grounded research*. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif, yaitu penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau kelompok tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi.⁷

Sehingga hasil penelitian ini adalah berupa gambaran yang menguraikan analisa terkait tanggungjawab penyidik dalam mengamankan barang bukti tindak pidana narkoba jenis tanaman berdasarkan pasal 8 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.

G. Sistematika Penelitian

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis menyusun dalam empat bab yang didalamnya terdiri atas sub bab agar mempermudah memahami penulisan hukum. Adapun sistematika penelitian adalah sebagai berikut.

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yakni latar belakang yang menjabarkan alasan permasalahan yang diangkat, rumusan masalah berisi permasalahan yang diangkat, tujuan penulisan yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan dan manfaat yang menjelaskan kegunaan bagi penulis, kalangan akademisi dan aparat penegak hukum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi deskripsi atau uraian dari teori yang digunakan atau yang melandasi dari penulisan proposal hukum. Dalam hal ini menguraikan tentang

⁷ Koentjaraningrat. *Metode- metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : PT Gramedia. 1993. Hal.89

tinjauan umum tentang analisa yuridis, penegak hukum kepolisian dan tindak pidana narkoba

BAB III PEMBAHASAN

Di dalam pembahasan penulis akan menguraikan hasil penelitian berupa analisa yang merupakan hasil penjabaran jawaban dari rumusan masalah dan dikaitkan dengan teori-teori yang melandasi.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab penutup yang menjadi sub bab yakni kesimpulan dan saran dari penulis. Kesimpulan berisikan intisari pembahasan yang didapatkan dalam penulisan ini. Sedangkan saran berisikan rekomendasi dari penulis atas permasalahan yang diangkat.

